UANG PANAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT MUSLIM SUKU BUGIS DI SULAWESI TENGAH

Retno Sugiarti

Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah Kediri.

Email: retnosugiarti36@gmail.com

Abstract

Panai Money (Shopping Money) which in Bugis language is called *du'I panre* is an amount of money given by the man to the woman during the applivation process (Mapettuada). In Islamic law, Panai Money does not have a legal basis, but Panai Money is stated in Sura Al-Baqarah verse 185 which in the verse explains about "God always makes it easy for every servant". Giving Panai Money in the Bugis muslim community has become a hereditary tradition until now. The research was conducted to find facts in the community in Parigi District, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province on the use of Panai Money in marriages of the Bugis Muslim Community, with research that answer two problem formulations, namely (1) How is Panai Money in Islamic Law Perspective?, and (2) How to Panai the Perspective of the Bugis Muslim Community in Central Sulawesi?. This study uses empirical law with a qualitative descriptive qualitative approach which in this approach uses real facts and evidence to be used in research and to find out the reasons why the Bugis Muslim Community continues to use Panai Money in terms of marriage. The research data was generated through observation, interviews and analyzed through 4 stages, namely: Data Reduction, Data Presentation, Data Verification, and Data Analysis. The results of this study indicate it is not explained whether or not the use of Panai Money is allowed in marriage, but it is called *al a'dah as shahih* or called *urf shahih*, which is a good custom, as explained in the fiqiyah rules *al a'dah al muhakkamah*, which means that a custom can be made law if it does not conflict with Islamic teachings because Panai Money has become a good habit and does not burden the prospective groom. And from six pairs of Bugis muslim communities in Central Sulawesi using Panai in marriage, the amount of which has been agreed upon by the prospective groom and the prospective bride's family, the presence of this gift indicates that the prospective groom agrees to the marriage with the Panai Money. The use of Panai Mney in their marriage is for the purpose of the wedding, but there are also those who use Panai Money as capital after marriage.

Keywords: Panai Money, Islamic Law, Bugis Muslim Culture.

PENDAHULUAN

Budaya merupakan sebuah kebiasaan kelompok yang melahirkan berbagai macam unsur yang di dalamnya terkait bahasa, adat, pakaian, dan lain sebagainya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Koentjaraningrat dalam buku *Pengantar Ilmu Antropologi*, menjelaskan bahwa kebudayaan dibagi menjadi tiga wujud diantaranya, yaitu: *Pertama*, Wujud kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks aktivitas serta tindakan kehidupan manusia dalam bermasyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan yang mana menghasilkan benda-benda karya manusia. (Marini, 2018 : 19)

Berbicara tentang keterkaitan budaya dan agama, maka dalam agama menganjurkan melakukan perkawinan karena manusia diciptakan berpasangan dan tentunya kedua insan saling membutuhkan dalam hal biologis, oleh karena itu dengan adanya berbagai macam budaya di Indonesia terdapat pula banyak adat istiadat atau tradisi perkawinan yang terjadi. Salah satu budaya tersebut adalah suku Bugis yang masyarakatnya berpegang teguh pada agama Islam. Suku Bugis terlahir di pulau Sulawesi lebih tepatnya di Sulawesi Selatan. Sejak awal abad ke-17 M, dan dalam perkembangannya sekarang suku bugis telah menyebar di berbagai daerah atau provinsi lainnya misalnya berada di Sulawesi Tengah. Walaupun suku Bugis berada di berbagai daerah namun budayanya tidak hilang melainkan sudah

turun temurun, salah satunya dalam hal pernikahan yang memiliki ciri khas tersendiri.

Budaya atau tradisi pernikahan dalam suku Bugis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebelum menikahi calon istrinya, syarat tersebut adalah adanya Uang Panai. Uang Panai lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya pernikahan, sehingga nominal Uang Panai lebih besar dari nominal mahar. Seseorang yang sangat paham dengan budaya Uang Panai biasanya melakukan kompromi atau sebuah tawar menawar terlebih dahulu terkait Uang Panai, namun jika Uang Panai yang dimintai keluarga calon mempelai wanita mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarga calon mempelai wanita. Tradisi Uang Panai ini menjadi salah satu alasan dan hal penting untuk dilakukan dalam pernikahan budaya masyarakat muslim Suku Bugis karena di era serba modern seperti ini banyak tradisi lain yang mulai ditinggalkan adat istiadat asal daerahnya.

Uang Panai disebut juga dengan istilah Uang Belanja dalam bahasa Bugis lebih dikenal dengan *Du'i Panre*. Uang Panai merupakan uang pinangan yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Pemberian Uang Panai dilaksanakan pada saat proses lamaran (*Mapettuada*). Seperti salah satu hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 20 Mei 2021 yaitu pada saat proses lamaran pasangan yang bernama Ahmaf Afandi dan Rahmi Rahayu, bahwasanya pada saat proses lamaran (*Mapettuada*) tersebut terjadi pemberian Uang Panai yang besar jumlahnya telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita dan jumlah Uang Panai tersebut telah disepakati oleh calon mempelai laki-laki yaitu sebesar 50 juta dengan membawa seserahan berupa adat yang telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita serta mahar yang diberikan oleh

calon mempelai laki-laki saat proses ijab qobul yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu berupa seperangkat alat sholat, uang tunai dan emas 30 gram. Maka dari itu Uang Panai ini tidak termasuk sebagai mahar dan tidak termasuk sebagai seserahan dalam pernikahan, karena mahar diberikan pada saat proses ijab dan qobul sedangkan seserahan ada yang diberikan pada saat proses lamaran dan ada juga yang diberikan pada hari pernikahan atau saat prosesi ijab qobul.

Seserahan (*erang-erang*) dalam suku Bugis merupakan tradisi yang harus dibawa oleh mempelai laki-laki sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Pemberian seserahan terdapat dua jenis yaitu seserahan kecil atau *appanaik lekok cakdi* dan seserahan besar atau *appanaik lekok lombo*. Seserahan kecil atau *appanaik lekok cakdi* diberikan saat proses lamaran atau penentuan hari pernikahan, seserahan yang diberi berupa seserahan adat seperti buah pinang, buah sirih, daun sirih, gambir, kapur, gula merah, beras, tembakau, dan uang keras. Sedangkan seserahan besar diberikan pada saat hari pernikahan berupa barang sesuai keinginan mempelai wanita dan kesepakatan kedua pihak keluarga.

Mahar dan Uang Panai dalam sudut pandang masyarakat muslim suku Bugis hampir mirip yaitu pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita akan tetapi tetap berbeda, karena dalam hukum Islam pemberian mahar yaitu wajib, seperti yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menjelaskan bahwa "calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak" sedangkan Uang Panai merupakan kewajiban dari tradisi adat istiadat suku Bugis. Penentuan Uang Panai pada umumnya ditentukan dengan status sosial calon mempelai wanita. Status sosial yang dimaksud merupakan keturunan keluarga (keturunan bangsawan), pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Pemberian Uang Panai dipandang dari status sosial calon mempelai

wanita, maka semakin tinggi pula Uang Panai yang akan ditanggung oleh calon mempelai laki-laki. Adapun jumlah atau nilai Uang Panai jika ditentukan dengan status sosial calon mempelai wanita yaitu: Pendidikan SD Rp 20 juta, SMP Rp 20-25 juta, SMA Rp 30 juta, S1 Rp 50 juta bahkan lebih apabila sudah memiliki pekerjaan, S2 Rp 100 juta bahkan lebih apabila sudah memiliki pekerjaan, dan jumlah atau nilai Uang Panai jika dilihat dari keluarga bangsawan yaitu menyesuaikan dari status pendidikannya bahkan jumlahnya lebih sesuai dengan permintaan keluarga calon mempelai wanita.

Tingginya Uang Panai dalam status pernikahan suku Bugis mendatangkan berbagai macam sudut pandang positif dan negatif. Ada yang beranggapan bahwa, pernikahan dengan tingginya Uang Panai dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras demi melangsungkan pernikahan dan ada juga yang beranggapan bahwa dengan adanya Uang Panai dengan nilai yang sangat tinggi dapat mengurangi angka perceraian dalam rumah tangga karena seorang suami akan berpikir berulang kali untuk melaksanakan pernikahan dengan pertimbangan jumlah Uang Panai yang sangat tinggi. Namun dalam sudut pandang negatif, ada yang beranggapan bahwa dengan nilai Uang Panai yang sangat tinggi dapat membatalkan atau menjadi penghambat pernikahan para pemuda yang siap melangsungkan pernikahan. Seperti kisah gadis yang bernama Risna yang sempat viral di media sosial, ketika menghadiri pernikahan mantan kekasihnya (Rais) yang dulunya telah menjalin kasih cukup lama sekitar tujuh tahun dan sempat dua kali datang melamar, dia dipeluk oleh mempelai laki-laki dihadapan semua tamu undangan sambil berlinang air mata. Setelah diwawancarai, ternyata penyebab mereka berpisah adalah tidak ada kesepakatan mengenai Uang Panai antara kedua keluarga. (Avita, 2019 : 5) Hal ini merupakan akibat ketidak mampuan dalam memenuhi jumlah Uang Panai yang telah ditentukan oleh keluarga

wanita. Padahal keduanya telah menjalin hubungan yang cukup lama dengan hubungan yang serius.

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Uang Panai Perspektif Hukum Islam dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Bugis (Studi Kasus di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah)” dengan tujuan memberi informasi tentang perkembangan masyarakat Bugis dalam tradisi pernikahan berkaitan dengan Uang Panai.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini berusaha mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Uang Panai Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Uang Panai Perspektif Masyarakat Muslim Suku Bugis di Sulawesi Tengah?

TUJUAN PENELITIAN

Secara umum peneliti memaparkan permasalahan berdasarkan rumusan masalah di atas dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Uang Panai Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk Menganalisis Uang Panai Perspektif Masyarakat Muslim Suku Bugis di Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dalam pendekatan ini menggunakan fakta dan bukti nyata yang akan digunakan dalam penelitian ini dan mengungkapkan hukum Islam yang terkait dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian lapangan (lokasi penelitian) sesuai dengan judul yang peneliti buat yaitu tentang “Uang Panai Perspektif Hukum Islam dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Bugis di Sulawesi Tengah”.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Primer

Peneliti memperoleh sumber data primer dari studi lapangan yang berhadapan langsung kepada masyarakat muslim suku Bugis yang menggunakan Uang Panai dalam pernikahan, hal ini mengacu pada judul peneliti yaitu Uang Panai Perspektif Hukum Islam dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Bugis di Sulawesi Tengah melalui wawancara.

2. Sumber Sekunder

Peneliti menggunakan data primer dengan menggunakan data sekunder yang mana dalam data tersebut diperoleh dari al-Quran, al Hadist, Hukum Islam, Budaya Masyarakat Muslim Suku Bugis di Sulawesi Tengah dan Kompilasi Hukum Islam.

Lokasi Penelitian

Peneliti memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah karena banyaknya potensi pernikahan yang menggunakan tradisi Uang Panai.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Observasi

Mendapatkan data melalui pengamatan secara langsung kemudian memahami pengetahuan dari sebuah pengamatan tersebut terhadap pelaku pernikahan yang menggunakan Uang Panai.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang

ditanyakan langsung kepada pelaku atau terhadap enam atau lebih pengguna Uang Panai dalam pernikahan Budaya Masyarakat Muslim suku Bugis, hal tersebut untuk mendapatkan data yang valid. Adapun responden yang akan diwawancarai terkait pernikahan tradisi Uang Panai yaitu:

- a. Pasangan Purnolawan dan Farida
- b. Pasangan Maryadi dan Riskayanti
- c. Pasangan Fitra dan Musdalifah
- d. Pasangan Abd. Salam dan Salma Pratiwi
- e. Pasangan Supardi dan Muli
- f. Pasangan Firman dan Wahyuni

Teknik Analisis Data

Sebelum menganalisis data, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan pembahasan yang diperoleh dari data sekunder, kemudian diolah menjadi data yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu suatu proses merangkum data berupa informasi valid kemudian dikumpulkan (dicatat) dalam penelitian.
2. Penyajian data, yaitu suatu proses mendeskripsikan data dari hasil wawancara terkait Uang Panai Perspektif Hukum Islam dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Bugis sehingga data yang disajikan dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif.
3. Verifikasi data, yaitu pengesahan atau persetujuan terkait Uang Panai Perspektif Hukum Islam dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Bugis sehingga dapat menghasilkan gambaran secara singkat dari pertanyaan-pertanyaan di lapangan (lokasi penelitian).
4. Analisis data, yaitu bentuk penyederhanaan informasi dari data yang didapatkan kemudian dikumpulkan menjadi sebuah data yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tahap ini peneliti mengolah data yang telah direduksikan dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian lapangan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Uang Panai Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengajarkan tentang berbagai kaidah-kaidah Ushul Fiqh, salah satunya yaitu *al adah al muhakkamah* yang artinya yaitu suatu adat bisa dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena adat ada yang pasif dan ada yang aktif. (A, Wawancara 2021) Seperti pemberian Uang Panai yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan atau penghormatan bagi wanita dan untuk modal dalam melaksanakan acara pernikahan hal ini sebagai salah satu adat yang aktif atau hasanah.

Dalam ajaran Islam pemberian Uang Panai tidak menjadi batalnya pernikahan karena pemberian tersebut tidak memberatkan antara kedua belah pihak calon pengantin melainkan pemberian tersebut termasuk sebagai bentuk *wata'awanu alal biri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan). (Nur Avita, 2019 : 53)

Pemberian Uang Panai dalam ajaran Islam tidak menjadi larangan seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sebagai berikut.

a. A, Wawancara Tokoh Agama, 2021

“Dalam hukum Islam pemberian Uang Panai tidak menjadi larangan apabila tidak memberatkan sebelah pihak yaitu mempelai laki-laki dan tidak bertentangan dalam pernikahan, yang dimaksud bertentangan seperti halnya membuang makanan di laut yang mengakibatkan kemubaziran dan lain sebagainya, Uang Panai merupakan salah satu kebiasaan yang baik karena dengan adanya Uang Panai mempelai wanita bisa melaksanakan acara pernikahan (resepsi).” (A, Wawancara 2021)

Oleh karena itu Uang Panai tidak menjadi suatu larangan atau masalah apabila tidak memberatkan sebelah pihak dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam tidak

diharuskan adanya Uang Panai dalam pernikahan namun apabila ada adat yang harus dilaksanakan seperti pemberian Uang Panai maka dalam hukum Islam disebut dengan *al a'dah as shahihah* atau sering disebut dengan *urf shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar, dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum, Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 185.

Uang Panai dalam hukum Islam tidak memiliki landasan hukum akan tetapi Uang Panai diqiyaskan menjadi suatu kebiasaan yang baik seperti yang dijelaskan dalam kaidah Ushul Fiqh yaitu *al adah al muhakkamah* karena ada kebiasaan yang baik dan ada kebiasaan yang buruk. Adapun Uang Panai tidak memiliki landasan hukum, dalil, hadist dan lain sebagainya dikarenakan Uang Panai tidak dilaksanakan oleh semua orang melainkan hanya dilakukan oleh orang tertentu yaitu orang yang bersuku Bugis.

Uang Panai Perspektif Masyarakat Muslim suku Bugis di Sulawesi Tengah

Perkawinan menurut hukum adat tentunya bersangkutan paut dengan keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Adapun perkawinan adat dalam suku Bugis yaitu perkawinan yang harus dilaksanakan dengan ritual yang sakral, namun sebelum ritual yang dinamakan *appabottingeng* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita sekaligus penentuan pemberian Uang Panai, dimana pemberian tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada Uang Panai berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis sejak lama dan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sampai sekarang ini.

Oleh karena itu untuk menggali pemahaman dan pengetahuan mengenai Uang Panai dalam pernikahan, maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang terdiri dari pasangan suami

istri yang menggunakan Uang Panai dalam pernikahan sebagai berikut:

a. R dan M, Pengguna Uang Panai Kelurahan Maesa

Berdasarkan pandangan R dan M, menunjukkan bahwa Penggunaan Uang Panai adalah sebagai sarana biaya pernikahan yang berlangsung di rumah mempelai wanita. Pemberian Uang Panai dalam pernikahan R dan M telah terjadi tawar menawar karena kesanggupan calon mempelai laki-laki tidak sesuai dengan permintaan keluarga calon mempelai wanita. Hal tersebut menandakan bahwa Uang Panai tidak memberatkan calon mempelai laki-laki.

b. SP dan AS, Pengguna Uang Panai Kelurahan Kampal

Berdasarkan pandangan SP dan AS, menunjukkan bahwa penggunaan Uang Panai tidak seharusnya untuk keperluan pernikahan melainkan dapat dijadikan modal setelah berlangsungnya proses pernikahan, pemberian Uang Panai dalam adat pernikahan suku Bugis termasuk salah satu perbuatan yang sakral dan tentunya harus dilakukan karena sudah menjadi hak dan syarat dalam pernikahan suku Bugis.

c. M dan F, Pengguna Uang Panai Desa Dolago

Berdasarkan pandangan F dan M bahwa penggunaan Uang Panai dalam pernikahan yaitu untuk keperluan acara pernikahan (resepsi) yang dilangsungkan atau dilaksanakan dirumah mempelai wanita, pemberian Uang Panai yang telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita merupakan suatu kehormatan bagi seorang wanita walaupun kehormatan seorang wanita tidak dapat diukur dengan banyaknya uang.

d. M dan S, Pengguna Uang Panai Kelurahan Bambalemo

Berdasarkan pandangan M dan S bahwasannya penggunaan Uang Panai dalam pernikahan yaitu untuk keperluan acara pernikahan yang dilaksanakan dirumah mempelai wanita dan

pemberian Uang Panai termasuk sebuah penghargaan kepada mempelai wanita dan juga keluarga mempelai wanita.

e. F dan P, Pengguna Uang Panai Kelurahan Kampal

Berdasarkan pandangan F dan P, bahwasannya penggunaan Uang Panai yaitu untuk keperluan acara pernikahan yang dilaksanakan dirumah mempelai wanita dan pemberiannya berdasarkan kesepakatan kedua pihak keluarga yaitu keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki.

f. W dan F, Pengguna Uang Panai Kelurahan Kampal

Pasangan suami istri W dan F berpendapat tentang penggunaan Uang Panai adalah suatu pemberian oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk keperluan acara pernikahan sehingga acara tersebut dapat dilaksanakan dengan semeriah mungkin.

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari para narasumber pelaku pengguna Uang Panai bahwasannya penggunaan Uang Panai dalam pernikahan yaitu untuk keperluan pernikahan yang dilaksanakan di kediaman atau rumah mempelai wanita, adapun pemberian Uang Panai sudah menjadi syarat dan turun temurun dalam pernikahan suku Bugis.

Jadi, jika dalam pernikahan jumlah Uang Panai mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka hal ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki menyetujui pernikahan dengan adanya Uang Panai yang telah menjadi syarat dalam meminang wanita suku Bugis.

Analisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian lapangan ini sebagai berikut.

Uang Panai Perspektif Hukum Islam

Uang Panai merupakan tradisi dalam pernikahan suku Bugis yang sudah menjadi turun

temurun sampai saat ini, pemberian Uang Panai ini hanya terjadi dalam syarat pernikahan suku Bugis yang mana pemberian tersebut wajib diberikan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita untuk keperluan acara pernikahan (resepsi) dan ada pula kegunaannya untuk hidup bersama setelah acara pernikahan, sedangkan dalam ajaran Islam pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki hanyalah mahar yang hak dan kewajibannya dimiliki oleh mempelai wanita setelah menikah.

Mahar dan Uang Panai merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pernikahan suku Bugis karena dalam prakteknya kedua hal memiliki posisi yang sama yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi, namun Uang Panai dan mahar tidak dapat disatukan dalam pemberiannya karena Uang Panai sebagai kewajiban tradisi suku Bugis dan tidak dilaksanakan oleh suku lain sedangkan mahar sebagai kewajiban dalam hukum Islam, akan tetapi Uang Panai lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang dapat melancarkan jalannya pernikahan sehingga jumlah Uang Panai yang ditentukan oleh keluarga mempelai wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta mempelai wanita, hal ini sudah menjadi lumrah bagi seseorang yang bersuku Bugis jika ingin menikah.

Secara hukum Islam tidak ada landasan atau aturan yang menerangkan bahwa pemberian Uang Panai sebagai syarat wajib dan sahnya suatu pernikahan akan tetapi dalam hukum Islam pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki ketika ingin melangsungkan pernikahan hanyalah mahar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surah an-Nisa ayat 4, yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْتَهُنَّ مِمَّا نَفْسًا
فَكُلُوهُنَّ مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Pemberian Uang Panai tidak dijelaskan dengan jelas dalam hukum Islam tentang boleh atau tidaknya penggunaan Uang Panai dalam pernikahan akan tetapi dalam hukum Islam disebut dengan *al a'dah as shahihah* atau sering disebut dengan *urf shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar, dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu *urf* atau adat adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Huda, dkk. 2018 : 11) Adat kebiasaan yang sudah mandarah daging dalam kehidupan seseorang dapat dijadikan pijakan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqiyah yaitu menjelaskan bahwa *al adah al muhakkamah* yang artinya suatu adat dengan kebiasaan yang baik dapat dijadikan pijakan hukum apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (A, wawancara 2021) Adapun Uang Panai dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek tinjauan sebagai berikut:

- a. Uang Panai dilihat dari objeknya masuk kedalam *al-urf al-amali* yang mana kebiasaan seseorang atau masyarakat lainnya dalam kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan orang lain, karena Uang Panai merupakan suatu tradisi suku Bugis yang memiliki kebiasaan dalam menentukan jumlah Uang Panai dengan tawar menawar.
- b. Uang Panai dilihat dari cakupannya masuk kedalam *al-urf al-khash* yang mana suatu kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat atau kalangan tertentu, karena Pelaksanaan pemberian Uang Panai hanya terjadi dikalangan masyarakat muslim suku Bugis, baik yang bertempat tinggal di kota asalnya yaitu Sulawesi Selatan atau masyarakat Bugis yang telah merantau.
- c. Uang Panai dilihat dari keabsahannya masuk kedalam, *al-urf al-shahih* yang mana adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu al Qur'an dan al Hadist. karena secara umum pemberian

Uang Panai tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena pemberian Uang Panai sebagai bentuk hadiah kepada calon mempelai wanita yang digunakan untuk biaya pernikahan (resepsi) dan sebagai modal setelah menikah, Pemberian Uang Panai dalam pernikahan suku Bugis diqiyaskan menjadi suatu kebiasaan yang baik karena tidak merugikan sebelah pihak yaitu mempelai laki-laki namun apabila mempelai laki-laki merasa keberatan maka terjadilah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan jumlah Uang Panai yang mampu diberikan oleh mempelai laki-laki. Seperti firman Allah SWT dalam potongan surah al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.

Dalam potongan ayat tersebut dapat diartikan bahwa Allah memberikan kemudahan bagi setiap hambanya untuk melangsungkan hal baik dan tentunya hal ini kembali lagi kepada setiap individu yang menjalankannya, oleh karena itu tradisi ini bukan sebagai media untuk menentukan siapa yang mahal dan siapa yang murah melainkan dari tradisi ini kita belajar bahwa, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan harus benar-benar berusaha, bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk memenuhinya.

Uang Panai diberikan pada saat proses lamaran, dalam proses ini biasanya terjadi atau tidaknya tawar menawar antara kedua belah pihak apabila tidak mampu memenuhi jumlah Uang Panai yang telah ditentukan, sehingga pemberian Uang Panai tersebut tidak dianggap memberatkan sebelah pihak karena dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hibban dan al-Hakim menerangkan sebagai berikut:

“Diantara kebaikan wanita adalah mudah meminangnya, mudah maharnya dan mudah rahimnya”.

Oleh karena itu dengan adanya proses tawar menawar tersebut sehingga Uang Panai dapat dipandang tidak memberatkan sebelah pihak yaitu calon mempelai laki-laki dan berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tradisi pemberian Uang Panai di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah termasuk tradisi pemberian Uang Panai dalam hukum Islam *al-urf as-shahih* yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pemberian Uang Panai juga sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan jumlah Uang Panai tersebut.

Uang Panai Perspektif Masyarakat Muslim Suku Bugis di Sulawesi Tengah

Uang Panai atau dikenal juga dengan istilah uang belanja dalam bahasa Bugis lebih dikenal dengan *Du'l Panre* merupakan uang pemberian calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai bentuk kehormatan dan kesiapan untuk melangsungkan pernikahan. Pemberian Uang Panai dilaksanakan pada proses lamaran (*mapettuada*) untuk keperluan acara pernikahan yang dilaksanakan di kediaman atau rumah mempelai wanita. Kegunaan Uang Panai sesuai dengan nama istilahnya yaitu uang belanja, oleh karena itu semakin besar Uang Panai yang diberikan oleh mempelai laki-laki maka semakin besar juga keperluan belanja pernikahan yang akan dilangsungkan.

Uang Panai dikenal pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo, Kabupaten Gowa yang dibawah langsung oleh pemerintahan Sultan Muhammad Said Tumenanga Ri Balla' Pangkana. Pada saat itu ada seorang lelaki yang ingin meminang keluarga kerajaan atau keturunan raja maka ia harus membawa seserahan

yang menunjukkan bahwa ia mampu untuk meminang. Hal tersebut untuk menyakinkan bahwa seorang laki-laki dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya kelak. Namun ada yang beranggapan bahwa adanya Uang Panai karena untuk melindungi perempuan Bugis dari orang Belanda yang gemar menikahi perempuan Bugis dengan mudah pada zaman penjajahan, dengan adanya Uang Panai ini dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan Bugis serta Uang Panai semakin tinggi nilainya pada masa kerajaan Bone Gowa Tallo.

Uang Panai dalam tradisi Bugis merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap norma, strata sosial atau status sosial dan dengan adanya pemberian Uang Panai seorang laki-laki dianggap siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan. Secara umum Uang Panai digunakan untuk keperluan acara pernikahan namun ada juga yang menggunakan sebagai modal setelah menikah,

Nilai Uang Panai sangat berharga dan sangat berpengaruh dalam pernikahan masyarakat muslim suku Bugis, bahkan saat ini Uang Panai dapat dijadikan motivasi bagi seorang lelaki untuk bersungguh-sungguh dalam hal bekerja demi mewujudkan keinginan untuk menikahi pasangan yang telah dipilihnya.

Pemberian Uang Panai dalam pernikahan masyarakat muslim suku Bugis di Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam pemberian mahar dan seserahan (*erang-erang*), akan tetapi dalam pernikahan masyarakat muslim suku Bugis di Sulawesi Tengah pemberian mahar dan seserahan dilaksanakan pada saat proses ijab qobul. Pada saat ini dalam suku Bugis, mahar jarang berupa uang akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah, perhiasan, mobil, kebun, ataupun sawah yang biasa orang Bugis menyebutnya *Sompa* (mahar). Sedangkan untuk seserahan (*erang-erang*) yaitu berupa adat yang telah ditentukan, adapun adat

tersebut berupa rempah-rempah seperti: buah pinang, buah sirih, daun sirih, gambir, kapur, gula merah, beras, tembakau, dan uang kertas yang masing-masing rempah berjumlah tujuh buah. Hal ini untuk menyakinkan agar tidak terjadi batalnya pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Apabila terjadi batalnya pernikahan, maka harus membayar denda sesuai yang ditentukan keluarga wanita.

Pemisahan pemberian Uang Panai dan mahar dikarenakan Masyarakat Muslim suku Bugis sangat berpegang teguh pada tradisi dan budaya yang mereka miliki akan tetapi hal tersebut tentunya tidak mengesampingkan ajaran Islam karena dalam pernikahan mereka tetap menggunakan mahar, pemisahan tersebut dikarenakan kegunaan Uang Panai dan mahar, yang mana Uang Panai sebagai adat dalam pernikahan suku Bugis yang digunakan untuk keperluan acara pernikahan (*resepsi*) atau *walimatul urusy* dan mahar sebagai hukum Islamnya atau dari segi religiusnya yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita.

Menurut masyarakat muslim suku Bugis di Sulawesi Tengah lebih tepatnya di Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong tentang penggunaan Uang Panai dalam pernikahan sebagai berikut.

- a. Uang Panai sebagai syarat dalam pernikahan suku Bugis.
- b. Uang Panai sebagai bentuk pemberian dan kehormatan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita.
- c. Pemberian Uang Panai sesuai kesepakatan kedua belah pihak, apabila calon mempelai laki-laki tidak menyanggupi Uang Panai yang telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita.
- d. Uang Panai sebagai modal setelah menikah dan untuk keperluan acara pernikahan di rumah mempelai wanita.

Dibalik pendapat-pendapat masyarakat muslim suku Bugis diatas, bahwasannya sesuai dengan

yang penulis bahas sebelumnya yaitu pemberian Uang Panai ditentukan berdasarkan status sosial calon mempelai wanita yang mana apabila Pendidikan SD Rp 20 juta, SMP Rp 20-25 juta, SMA Rp 30 juta, S1 Rp 50 juta bahkan lebih apabila sudah memiliki pekerjaan, S2 Rp 100 juta bahkan lebih apabila sudah memiliki pekerjaan, dan jumlah atau nilai Uang Panai jika dilihat dari keluarga bangsawan yaitu menyesuaikan dari status pendidikannya dan bahkan jumlahnya lebih, sesuai dengan permintaan keluarga calon mempelai wanita. Namun apabila pihak calon mempelai laki-laki merasa keberatan dengan jumlah yang telah ditentukan maka akan terjadi proses tawar menawar untuk meringankan calon mempelai laki-laki sehingga memudahkan jalannya pernikahan.

Jadi menurut Masyarakat Muslim suku Bugis di Sulawesi Tengah jika, jumlah Uang Panai mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki walaupun dengan adanya proses tawar menawar menandakan bahwa calon mempelai laki-laki menyetujui pernikahan dengan adanya pemberian Uang Panai dan hal ini menjadi suatu kehormatan bagi pihak keluarga mempelai wanita serta memiliki rasa penghargaan atas pemberian tersebut. Oleh karena itu dalam pernikahan masyarakat muslim suku Bugis menggunakan Uang Panai untuk menjaga kehormatan keluarga dan dengan pemberian Uang Panai yang telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki menandakan bahwa ia menyetujui pernikahan dengan adanya Uang Panai serta adanya Uang Panai tersebut dapat mengangkat derajat keluarga mempelai wanita, agar sebuah pernikahan yang dilaksanakan benar-benar karena kesanggupan dan kesiapan mempelai laki-laki dan mempelai wanita serta diharapkan tidak terjadinya perceraian karena dalam pernikahan membutuhkan Uang Panai yang jumlah besarnya telah ditentukan oleh keluarga wanita.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan pemaparan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan boleh atau tidaknya penggunaan Uang Panai dalam pernikahan dan tidak memiliki dasar hukum hanya saja di qiyaskan menjadi suatu perbuatan yang baik seperti dijelaskan dalam kaidah fiqiyah *al adah al muhakkamah* yang artinya yaitu suatu adat bisa dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan pemberian Uang Panai sebagai bentuk *wata'awanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan), Uang Panai dan mahar dalam pernikahan suku Bugis tidak dapat dipisahkan akan tetapi tidak dapat dileburkan menjadi satu, dikarenakan mengedepankan keduanya antara adat istiadat dan ajaran Islam.
2. Masyarakat Muslim suku Bugis di Sulawesi Tengah memahami bahwa Uang Panai merupakan syarat dalam pernikahan suku Bugis yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita yang diberikan pada saat proses lamaran, hal tersebut menandakan bahwa calon mempelai laki-laki menyetujui pernikahan dengan adanya Uang Panai. Penggunaan Uang Panai dalam pernikahan suku Bugis digunakan untuk keperluan acara pernikahan yang dilaksanakan dirumah mempelai wanita dan ada juga yang menggunakannya sebagai modal hidup setelah menikah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengkaji hukum keluarga dengan penelitian ini diharapkan ada pemaknaan lebih jelas mengenai konsep tentang Uang Panai yang

diberikan dalam pernikahan suku Bugis sehingga pemberian Uang Panai tidak dianggap memberatkan sebelah pihak yaitu calon mempelai laki-laki.

2. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat memfokuskan tentang Uang Panai secara spesifik dalam hukum Islam sehingga benar-benar diakui bahwa penggunaan Uang Panai dalam pernikahan tidak menjadi batalnya pernikahan walaupun tidak memiliki dasar hukum dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Avita, N. (2019). *Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Drs.H.Mapeasse. (2021, Juni 19). *Budaya Masyarakat Muslim suku Bugis di Sulawesi Tengah. Tokoh Adat Suku Bugis*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.
- Hj.Astuti, L. (2021, Juni 1). *Uang Panai Perspektif Hukum Islam. Tokoh Agama Sulawesi Tengah*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.
- Huda, M., & Evanti, N. (2018). *Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Urf*. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia.
- Jaya, F., & Musdalifa. (2021, April 28). *Pengguna Uang Panai*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Marini. (2018). *Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Pratiwi, S., & Salam, A. (2021, April 22). *Pengguna Uang Panai*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.
- Purnolawan, & Farida. (2021, Mei 5). *Pengguna Uang Panai*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.
- Riskayanti, & Maryadi. (2021, April 20). *Pengguna Uang Panai*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.
- Supriadi, & Muli. (2021, Mei 7). *Pengguna Uang Panai*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.
- Wahyuni, & Firman. (2021, Mei 10). *Pengguna Uang Panai*. (R. Sugiarti, Interviewer) Kota Parigi.